

**STUDI SINERGITAS PERGURUAN TINGGI KEPARIWISATAAN DAN  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN PANGKEP  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Ilham Junaid**

**Abstract**

The Ministry of Tourism of Indonesia has been supervising four tourism higher schools (with two additional tourism higher schools) to produce human resources in the tourism and hospitality industry. For this reason, there should be good synergy between the tourism higher school and the regional board of tourism particularly if they are located in the same destination. Nevertheless, there is no empirical data concerning how the regional board of tourism and the tourism higher school collaborate in developing the regional tourism. This research aims at examining the partnership between the regional government and the tourism educational institution as well as proposing recommendation in strengthening synergy between the two institutions. By implementing qualitative research in April 2016 through interviews to staffs in the Tourism Board of Pangkep Regency of South Sulawesi and the Tourism Polytechnic of Makassar, this research reveals that partnership has been implemented by Bandung Tourism Institute and the Tourism Board of Pangkep Regency. This fact arises question on the role of Makassar Tourism Polytechnic in building synergy with the regional government particularly in the eastern part of Indonesia. Thus, it is recommended that partnership should be strengthened through formal and informal tourism activities guided by the Tourism Polytechnic of Makassar. Education and training in tourism for staff is required to support the partnership.

**Keywords:** *Synergy, Partnership, Tourism Polytechnic of Makassar, The Regional Board of Tourism of Pangkep Regency*

## Pendahuluan

Pariwisata daerah atau destinasi wisata menjadi tidak berkembang manakala tidak melibatkan unsur-unsur (kelompok masyarakat) yang saling terkait. Hal ini telah menjadi kesepakatan diantara para praktisi, pemerhati ataupun akademisi bidang pariwisata bahwa pariwisata adalah kegiatan multi sektoral. Karena itu, tidak heran jika pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya untuk mengajak berbagai pihak untuk bekerja secara bersama-sama mengembangkan pariwisata daerah.

Salah satu usaha pemerintah dalam melibatkan berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata adalah melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan institusi luar. Berbagai pendekatan dilakukan pemerintah (misalnya pemerintah daerah) dalam menjalin kerjasama dengan institusi luar. Pendekatan yang mungkin paling banyak dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini adalah kerjasama atau kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi khususnya perguruan tinggi bidang pariwisata dan hospitaliti.

Sesungguhnya, tujuan utama dari upaya kemitraan ataupun kerjasama adalah untuk melibatkan berbagai unsur (dalam hal ini *stakeholder* pariwisata) untuk memberikan masukan ataupun ide-ide pengembangan pariwisata (Aas, Ladkin, dan Fletcher, 2005; Selin, 2000). Bramwell dan Lane (2005) mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata yang melibatkan berbagai pihak dapat menjadi acuan pengembangan pariwisata mengingat dialog, negosiasi ataupun diskusi akan menghasilkan usulan dan rancangan pengelolaan dan pengembangan pariwisata berdasarkan perspektif para *stakeholder*. Dalam hal ini, ada harapan

yang besar dari pemerintah daerah khususnya Dinas pariwisata daerah (Dinas pariwisata kabupaten dan kota) untuk menerapkan pendekatan pengembangan pariwisata yang merupakan hasil kajian secara mendalam dan sistematis.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat institusi pendidikan pariwisata di bawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pendidikan bidang kepariwisataan khususnya di kawasan Timur Indonesia. Akademi Pariwisata Makassar (sekarang Politeknik Pariwisata Makassar) sebagai pendidikan tinggi bidang kepariwisataan diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pariwisata daerah. Sebaliknya, dinas pariwisata daerah membutuhkan mitra dalam membangun pariwisata daerah.

Kedua lembaga pemerintah tersebut diharapkan membangun sinergi yang kuat apalagi jika keduanya berada pada destinasi yang sama. Sinergi tersebut perlu dikaji secara mendalam agar dapat merekomendasikan pendekatan untuk menguatkan kemitraan tersebut. Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi pariwisata tentunya memerlukan mitra agar mampu mengelola daya tarik wisata daerah yang dimiliki. Hal ini mengisyaratkan perlunya rekomendasi atau strategi menguatkan sinergi antara pemerintah daerah dan pendidikan tinggi pariwisata dan hospitaliti.

Eksistensi Politeknik Pariwisata Makassar (Poltekpar Makassar) khususnya dalam mengembangkan pariwisata daerah perlu dikaji secara mendalam. Mengingat Poltekpar Makassar berada di Sulawesi Selatan, maka keberadaannya seharusnya sejalan dengan pengembang-

an pariwisata daerah khususnya di Sulawesi Selatan. Namun, belum adanya data empiris mengenai bagaimana sinergi antara Dinas pariwisata daerah (khususnya kabupaten Pangkep) dan Poltekpar Makassar menjadi alasan pentingnya melakukan penelitian yang berkaitan dengan kemitraan di antara kedua lembaga pemerintah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan pariwisata daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi ataupun strategi pengembangan pariwisata daerah dalam perspektif kemitraan atau sinergi dinas pariwisata daerah dan lembaga pendidikan tinggi pariwisata.

## **Kajian Pustaka**

### **Kemitraan dan Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata**

Seiring dengan implementasi otonomi daerah di Indonesia, terdapat harapan yang besar dari para *stakeholder* pariwisata bahwa otonomi daerah seharusnya mendorong Dinas pariwisata daerah untuk mengembangkan pariwisata. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa kewenangan yang diberikan ke daerah untuk mengatur daya tarik wisatanya seharusnya menjadi pemicu bagi daerah untuk kreatif menerapkan strategi pengembangan pariwisata daerah (Brodjonegoro dan Asanuma, 2000; Duncan, 2007). Bramwell (2004) berpendapat bahwa negara-negara berkembang dengan implementasi otonomi daerah telah meminimalkan peran pemerintah pusat yang berarti peran pemerintah daerah

menjadi tumpuan pengembangan pariwisata daerah. Dengan demikian, otonomi daerah dipandang sebagai pendorong perlunya melakukan kemitraan agar daerah dapat terbantu dalam menutupi kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata daerah.

Pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) juga menjadi alasan mengapa kemitraan atau kolaborasi perlu diimplementasikan. Pariwisata berkelanjutan menuntut peran para *stakeholder* pariwisata untuk terlibat dalam aktifitas pariwisata (Altinay dan Hussain, 2005; Byrd, 2007; Dwyer dan Edwards, 2010; Farrel dan Twinning-Ward, 2005). *Stakeholder* pariwisata diartikan sebagai mereka yang secara langsung ataupun tidak langsung memperoleh dampak ataupun memberikan dampak dari suatu aktifitas atau pengembangan pariwisata (Byrd, 2007; Freeman, 1984). Pemerintah, masyarakat dan pengusaha adalah contoh *stakeholder* pariwisata. Pendidikan tinggi pariwisata yang di dalamnya terdapat individu-individu juga merupakan *stakeholder* pariwisata.

Pariwisata tidak terlepas dari dua peran utama yakni sektor swasta dan sektor publik. Sektor swasta diartikan sebagai mereka yang terlibat secara langsung sebagai pelaksana atau pengusaha dibidang pariwisata. Pengusaha dibidang pariwisata juga memiliki cakupan besar, misalnya pengusaha hotel, biro perjalanan, transportasi, dll. Sebaliknya, sektor publik berperan penting dalam keberlanjutan aktifitas pariwisata di suatu destinasi. Hal ini didasarkan pada realita bahwa sektor publik atau pemerintah menjadi pemegang kendali maju mundurnya pariwisata suatu daerah.

Pemerintah (khususnya pemerintah daerah melalui dinas pariwisata kabupaten dan kota) menjadi salah satu penentu berkembangnya pariwisata di daerah.

Kedua sektor tersebut tidak dapat dipisahkan jika suatu destinasi akan mengembangkan dan mempromosikan daya tarik wisata ke wisatawan baik lokal maupun internasional. Jeffries (2001) berpendapat bahwa tolak ukur pengembangan pariwisata yang bersifat jangka panjang (*long term development of tourism*) hanya dapat dicapai dengan melibatkan secara optimal kedua sektor tersebut. Di Indonesia, peran pemerintah sebagai aktor utama masih menjadi kunci keaktifan penyelenggaraan *event-event* pariwisata di daerah. Tentunya, pemerintah (baik pusat maupun daerah) diharapkan melibatkan masyarakat sebagai pelaksana utama dengan fasilitasi oleh pemerintah.

Terdapat dua alasan mengapa pemerintah mutlak berperan penting dalam mengembangkan pariwisata (Jeffries, 2001). Pertama, pemerintah memiliki tugas utama untuk membentuk perundangan-undangan ataupun peraturan yang selanjutnya menjadi panduan ataupun pedoman dalam mengatur kegiatan pariwisata. Kedua, kebijakan, legislasi dan program kerja pada umumnya didesain oleh pemerintah yang selanjutnya menjadi dasar dalam menjalankan strategi pengembangan pariwisata. Karena itu, pemerintah perlu memerhatikan aspek kemitraan dalam menjalankan fungsi atau tugas utama pembuatan kebijakan dan menjalankan kebijakan tersebut.

### **Peran Pendidikan (Perguruan) Tinggi Pariwisata dalam Kegiatan Pariwisata**

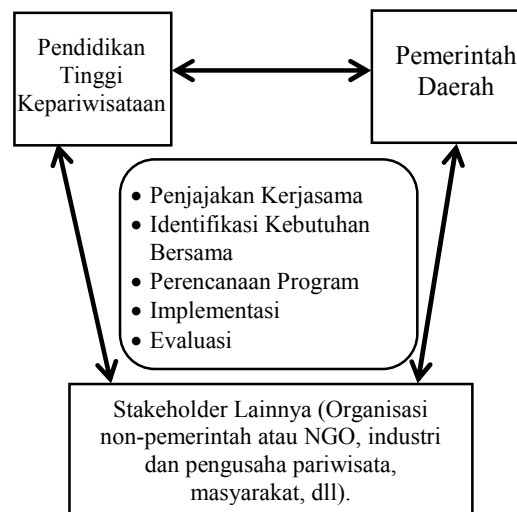
Pendidikan menjadi basis utama pengembangan pariwisata suatu daerah (Chang dan Hsu, 2010; Tribe, 2005). Salah satu alasan mengapa keberadaan pendidikan tinggi dibutuhkan adalah karena individu-individu yang ada di institusi tersebut diharapkan memberikan kontribusi positif dalam mengusulkan dan merekomendasikan pendekatan pengembangan yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Dunia akademik yang dijalankan oleh institusi pendidikan (perguruan) tinggi khususnya bidang kepariwisataan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kepariwisataan sehingga mereka menjadi agen perubahan dalam menelaah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata daerah. Ini berarti bahwa pemerintah dan pendidikan tinggi kepariwisataan menjadi tak terpisahkan khususnya karena mereka harus menjalin mitra yang kuat dalam melaksanakan program - program kepariwisataan (Chang dan Hsu, 2010).

Pendidikan tinggi kepariwisataan dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan vokasional dan konseptual yang dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan mereka ketika berada di industri (Inui, Wheeler dan Lankford, 2006). Para lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan tidak hanya bekerja di sektor hospitaliti tetapi juga di sektor pemerintahan. Karenanya, kompetensi dan pengetahuan yang berhubungan dengan pemerintahan juga dibutuhkan agar mereka mampu bekerja di berbagai sektor (Whitelaw, dkk., 2009). Dalam hal ini, pendidikan tinggi kepariwisataan berperan penting dalam memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja yang variatif.

Selain perhatian terhadap kurikulum yang berbasis pemenuhan kebutuhan industri (Tribe, 2014), pendidikan tinggi kepariwisataan dituntut untuk menjalankan peran tridarma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada di suatu daerah. Jauhari dan Thomas (2013) dalam Huang (2014:410) berpendapat bahwa “*synergy between universities and industry can lead to enormous economic growth, and the vision of universities should encompass usable research and partnerships that help them to build competencies that matter to industry and to other professionals*”. Sinergi antara perguruan tinggi dan industri sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Karena itu, suatu universitas mutlak menerapkan visi misi yang menekankan penelitian dan kemitraan yang terjalin dengan pihak industri. Dengan demikian, kemitraan menjadi tolak ukur kontribusi suatu perguruan tinggi dalam membantu masyarakat melalui kemitraan yang dibangun dengan sektor publik atau pemerintah.

Dalam menjalin kemitraan dengan pihak luar, ada beberapa tahap yang dapat menjadi pedoman suatu perguruan tinggi ataupun pemerintah daerah (lihat bagan 1). Pertama, proses penjajakan merupakan langkah awal untuk memulai suatu kemitraan. Dari proses penjajakan ini akan muncul kesepahaman diantara kedua pihak mengenai kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dapat dicapai jika kemitraan dilanjutkan dan dijalankan. Selanjutnya, tahap merencanakan program kerja menjadi

penting apalagi jika kedua belah pihak telah melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk *memorandum of understanding* (MoU).



Bagan 1. Proses Kemitraan Perguruan Tinggi dan Pemerintah daerah

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Idealnya, kedua pihak yang melakukan kerjasama harus memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan kerjasama. Tujuan utama kemitraan ini semata-mata untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata. Diharapkan dengan proses ini pemerintah dan perguruan tinggi dapat saling berbagi informasi terhadap implementasi program kerja serta evaluasi akhir apakah suatu program berjalan dengan baik atau perlu upaya-upaya lainnya.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam meneliti sinergi yang dilakukan pemerintah daerah dan pendidikan tinggi kepariwisataan dan hospitaliti. Sinergi yang dimaksudkan di sini adalah institusi pendidikan tinggi kepariwisataan dan hospitaliti (Politeknik Pariwisata Makassar) dan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami realita yang ada di lapangan dan mampu menghasilkan pengetahuan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti (Flick, 2007; Flick, dkk., 2004). Penelitian dilakukan pada bulan April 2016 dengan melakukan kunjungan langsung ke kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep sebanyak 2 (dua) kali kunjungan dan berkunjung ke daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Pangkep.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pegawai/staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) mampu memberikan gambaran mengenai dunia sosial (*social world*) yang ada karena interaksi antara informan dan peneliti. Dalam hal ini, interaksi antara peneliti dan informan mampu menguraikan apa yang terjadi berdasarkan topik penelitian yang sedang diteliti (Legard, dkk., 2003). Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pegawai dinas pariwisata Kabupaten Pangkep agar dapat memperoleh gambaran mengenai sinergi yang dilakukan dan strategi pengembangan pariwisata daerah. Namun, para pegawai merekomendasikan tiga informan utama yang dapat menjadi representasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep dan dapat membantu memberikan informasi. Hasilnya, wawancara mendalam yang dilakukan sekitar 45 menit setiap informan memberikan informasi mengenai kondisi aktual pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangkep.

Wawancara informal kepada para pegawai di Dinas pariwisata Pangkep juga memberikan informasi penting dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada dua orang informan dari Politeknik Pariwisata Makassar yang merupakan representasi Poltekpar khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama. *Participant observation* (observasi partisipatif) juga memberikan data mengenai pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangkep. Selanjutnya, data kualitatif yang diperoleh dianalisis dengan menerapkan prinsip analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis tematik diartikan sebagai suatu langkah menganalisis data dengan menganalisis, melihat pola-pola data dan melakukan interpretasi dan pelaporan (*reporting*) terhadap data yang ada (Liamputtong, 2009; Ritchie, dkk., 2003).

### **Pentingnya Jaringan (*network*) dan Penentuan Mitra Pariwisata**

Kementerian yang membidangi pariwisata telah ada sejak awal terbentuknya pemerintahan di Indonesia. Meskipun nama kementerian yang mengurus pariwisata berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia, pariwisata masih menjadi prioritas pengembangan daerah. Saat ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata telah bekerja untuk membangun pariwisata Indonesia. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah juga telah memasukkan pariwisata sebagai lokomotif peningkatan perekonomian masyarakat melalui keikutsertaan dalam

suatu dinas dengan nama yang bervariasi pula.

Salah satu kebijakan pemerintah pusat adalah mengembangkan pendidikan hospitaliti dan kepariwisataan melalui supervisi empat pendidikan tinggi bidang kepariwisataan yakni Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung, STP Bali, Politeknik Pariwisata Makassar (sebelumnya bernama Akademi Pariwisata Makassar) dan Akademi Pariwisata Medan. Saat ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata juga sedang membuka pendidikan tinggi bidang pariwisata di Lombok dan Batam. Politeknik Pariwisata Makassar secara khusus, diharapkan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota) khususnya di kawasan Timur Indonesia. Begitu pula dengan pendidikan tinggi lainnya diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pariwisata di daerah-daerah yang jika dilihat dari kedudukan dan lokasinya, mereka harus berkoordinasi dengan daerah-daerah tersebut.

Idealnya, keberadaan Politeknik Pariwisata Makassar seharusnya di manfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah baik dalam hal pendampingan pengembangan daya tarik wisata maupun dalam pembantuan pembuatan rencana pengembangan pariwisata daerah. Sebaliknya, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) sebagai wilayah yang administratifnya berada di wilayah Sulawesi Selatan dan tidak jauh dari kota Makassar mengharapkan membangun kemitraan agar mereka terbantu dalam mengembangkan pariwisata daerah.

Akan tetapi, idealisme dan harapan tersebut nampaknya tidak sejalan dengan

realita yang selama ini terjadi. Kabupaten Pangkep dengan potensi pulau-pulau dan daya tarik wisata alam dan budayanya nampaknya mengembangkan sayap kemitraan dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STP) Bandung. Pemilihan STP Bandung sebagai mitra pengembangan pariwisata nampaknya memunculkan pertanyaan mengenai dimana peran dan kontribusi Politeknik Pariwisata Makassar sebagai fasilitator ataupun pendamping pengembangan pariwisata daerah untuk kawasan Timur Indonesia. STP Bandung nampaknya mampu menjangkau daerah-daerah dan membuktikan eksistensinya dalam mengimplementasikan pengabdian pada masyarakat di wilayah-wilayah di Indonesia.

Dari perspektif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep, terdapat beberapa alasan mengapa Dinas melakukan kemitraan dengan STP Bandung dan belum menentukan pilihan ke Politeknik Pariwisata Makassar. Pertama, program pemagangan mahasiswa STP Bandung khususnya program studi kepariwisataan telah menjangkau daerah atau wilayah Kabupaten Pangkep. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa STP Bandung telah melakukan identifikasi potensi kepariwisataan yang dimiliki daerah tersebut lalu kemudian ditindaklanjuti dengan pengembangan kerjasama institusi melalui dosen-dosen di bawah naungan STP Bandung.

Sebaliknya, mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar khususnya program studi kepariwisataan belum pernah melirik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep sebagai lokasi pemagangan atau studi lapangan pariwisata. Politeknik Pariwisata

Makassar memiliki program studi manajemen pariwisata yang diharapkan menjangkau dan memahami potensi kewilayahan di Sulawesi Selatan serta daerah-daerah lain di Indonesia. Melihat realita ini, Politeknik Pariwisata Makassar nampaknya perlu mengubah strategi penerapan kurikulum dengan penekanan pada kemampuan nalar dan rekomendasi mahasiswa untuk wilayah Sulawesi Selatan.

Kedua, jaringan yang dimiliki setiap individu di Dinas Pariwisata kabupaten/kota nampaknya menentukan siapa mitra yang dipilih dalam mengembangkan pariwisata daerah. Kabupaten Pangkep dengan staf yang ada memiliki koneksi yang kuat dengan dosen ataupun staf yang ada di STP Bandung. Hal ini menjadi alasan mengapa kemitraan dapat diimplementasikan hingga ke daerah di kawasan Timur Indonesia. Jaringan dalam konteks ini dapat didefinisikan dalam artian yang luas karena individu-individu yang menjalin jaringan dalam dua institusi ini menjadi alasan perlunya mengembangkan pariwisata daerah dengan melakukan pendekatan *network* di Indonesia.

Terlepas dari kedua alasan tersebut di atas, Poltekpar Makassar dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diharapkan menjalin kemitraan yang erat dengan memerhatikan beberapa prinsip:

1. Prinsip kesamaan persepsi (pandangan) bahwa kedua institusi saling membutuhkan satu sama lain.
2. Prinsip keberlanjutan kemitraan yang dapat terjalin mengingat kesamaan latar belakang sosial budaya yang dimiliki yakni kebudayaan Sulawesi Selatan.

3. Prinsip kesadaran akan pentingnya mengembangkan pariwisata daerah dengan peran masing-masing individu yang ada di kedua lembaga pemerintah tersebut.
4. Prinsip kesamaan asal daerah sehingga menjadi pendorong untuk membawa ke daerah tingkat nasional dan internasional.
5. Prinsip melestarikan aset alam dan budaya yang dimiliki baik karena merupakan aset daerah maupun sebagai aset nasional yang diperuntukkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip-prinsip di atas menjadi alasan mengapa sinergi antara dua institusi pemerintah ini perlu diperkuat. Mitra pariwisata dapat diperluas dengan menjalin jaringan (*network*) antara individu-individu ataupun kelompok masyarakat.

Meskipun secara formalitas kemitraan belum terbangun antara Politeknik Pariwisata Makassar dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep, namun secara informal, telah terjadi koneksi antara kedua institusi ini. Dalam hal-hal tertentu, para staf di dinas tersebut telah mengenal dan memiliki komunikasi yang erat dengan para staf di Politeknik Pariwisata Makassar. Ini berarti bahwa kemitraan telah terjalin secara informal oleh individu-individu yang bekerja di kedua institusi tersebut. Staf di dinas pariwisata yang pernah mengikuti diklat atau sosialisasi kepariwisataan telah banyak mengenal staf di Poltekpar Makassar. Ini merupakan peluang yang besar bagi kedua institusi untuk mengembangkan kemitraan dalam



membangun pariwisata daerah melalui program kerjasama secara formal.

### **Kesadaran Pentingnya Kemitraan**

Kunjungan peneliti ke Dinas pariwisata daerah membuka peluang yang besar untuk membangun suatu sinergitas yang kuat antara Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep dan Politeknik Pariwisata Makassar. Meskipun kemitraan yang terbangun selama ini adalah kerjasama formal dengan STP Bandung, namun Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep sangat terbuka akan peluang mengembangkan kerjasama dengan institusi lain. Sebagai contoh, Politeknik Pariwisata Makassar telah menjalankan program sosialisasi atau bimbingan teknis ke masyarakat yang ada di sekitar pulau Camba-Cambang.

Terdapat beberapa catatan penting pelaksanaan kegiatan tersebut. Pertama, kegiatan tersebut belum sepenuhnya menyentuh staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep mengingat kegiatan tersebut lebih diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar daya tarik wisata. Meskipun beberapa staf dinas telah dilibatkan dalam kegiatan tersebut, namun belum memberikan penguatan kepada staf secara menyeluruh akan makna dan arti penting pariwisata. Kedua, staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat membutuhkan pembimbingan dan pengetahuan mengenai kepariwisataan sehingga prioritas kegiatan yang difasilitasi Poltekpar Makassar seyogyanya untuk kepentingan staf di Dinas Pariwisata daerah. Meskipun demikian, secara umum, telah ada upaya melaksanakan program pengabdian pada masyarakat oleh Poltekpar Makassar.

Jika kemitraan dapat dibangun antara Poltekpar Makassar dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep, terdapat beberapa harapan dan keinginan para staf yang selayaknya menjadi perhatian Poltekpar Makassar. Pertama, para staf membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bagaimana mengembangkan daya tarik wisata yang ada di daerah. Kurangnya staf yang berlatar belakang pariwisata menjadi kendala pengembangan daya tarik wisata karena konsep pengembangan lebih diperankan oleh kepala-kepala bidang. Sementara, para staf yang merupakan pelaksana langsung masih terbatas dalam hal pengetahuan dan keterampilan mengelola daya tarik wisata.

Kedua, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bagaimana mengatur atau membuat pola-pola perjalanan wisata. Pentingnya pola-pola perjalanan ini didasarkan pada kesadaran bahwa jarak antara satu daya tarik wisata dengan daya tarik wisata lainnya sangat berjauhan sehingga dibutuhkan suatu pendekatan yang mampu memberikan pengetahuan kepada wisatawan tentang bagaimana melakukan kunjungan ke setiap daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Pangkep. Ketiga, sosialisasi atau pemberian pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana memasarkan daya tarik wisata yang inovatif. Selama ini, upaya pemasaran dilakukan dengan cara menghadiri *event-event* pameran yang diselenggarakan oleh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Keikutsertaan mereka pada *event* tersebut dimanfaatkan untuk memasarkan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Pangkep. Pemasaran seperti ini nampaknya hanya menarik wisatawan domestik untuk datang ke Kabupaten

Pangkep, namun tidak dapat menjangkau wisatawan asing untuk datang mengunjungi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Pangkep.

Keempat, staf membutuhkan pelatihan *public speaking* dimana para staf mampu berkomunikasi dalam konteks pariwisata. Dalam hal ini, mereka membutuhkan informasi kebaruan mengenai kepariwisataan. Kemampuan meyakinkan masyarakat dan para anggota dewan perwakilan rakyat daerah mengenai arti penting pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat menjadi penting karena daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mengembangkan pariwisata daerah. Kesadaran akan pentingnya pelatihan seperti ini sangat dibutuhkan agar dapat digunakan dalam upaya diplomasi meyakinkan anggota legislatif agar dapat menerima bahwa pariwisata perlu dikembangkan sebagai suatu strategi membangun daerah.

Kelima, pembuatan paket wisata menjadi alternatif lain jika kemitraan dapat dibangun antara sekolah pariwisata dan Dinas pariwisata kabupaten dan kota. Awalnya, pelatihan pembuatan paket wisata pernah digagas dan dilaksanakan bersama dengan STP Bandung. Namun, pelatihan ini tidak berlanjut lagi, sementara daerah masih membutuhkan tindak lanjut pelatihan agar dapat menyusun paket wisata sesuai dengan kebutuhan dan harapan wisatawan. Poltekpar Makassar berpeluang besar mengembangkan kerjasama yang sinergis untuk membantu dinas-dinas di daerah.

Kabupaten Pangkep dengan keberadaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menyelenggarakan beberapa upaya dalam mengembangkan pariwisata daerah. Pembukaan Camba-Cambang, pulau yang dikelola

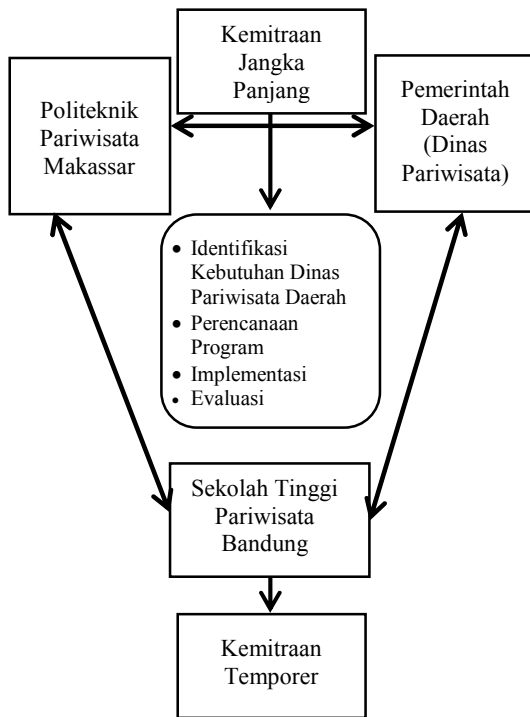
pemerintah dengan penyediaan fasilitas penginapan, wahana permainan air, gazebo serta warung makan menjadi pilihan utama bagi banyak wisatawan domestik. Pulau Camba-Cambang ini menjadi salah satu unggulan yang dimiliki daerah menarik wisatawan domestik dan asing untuk menikmati suasana pulau dengan nuansa laut di sekeliling pulau tersebut.

Festival seni budaya juga menjadi pilihan dalam menarik wisatawan datang ke kabupaten Pangkep. Festival kuliner dengan promosi sop saudara menjadi ikon utama daerah ini. Di seluruh wilayah Indonesia, sop saudara sering diidentikkan dengan keikutsertaan Kabupaten Pangkep. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kabupaten Pangkep untuk menjadikan sop saudara sebagai ikon pariwisata daerah tersebut. Di sepanjang poros jalan di Kabupaten Pangkep, pengunjung akan melihat berbagai jenis kuliner, misalnya kue dange, masakan tradisional dan buah-buahan hasil produk alam oleh masyarakat Kabupaten Pangkep. Festival kuliner diangkat sebagai upaya mendorong kreatifitas masyarakat untuk mengelola kuliner sesuai standar higienis.

Upaya dinas untuk menyelenggarakan *event* dan mempromosikan daya tarik wisata perlu dibarengi dengan ke terlibatan institusi pendidikan tinggi kepariwisataan. Jika STP Bandung telah membantu dinas merumuskan rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPPDA), maka Politeknik pariwisata Makassar dapat melakukan tindak lanjut yang lebih spesifik berupa pemberian pendidikan dan pelatihan sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Kondisi faktual kemitraan yang menggandeng STP Bandung bukanlah

merupakan suatu kemunduran terhadap eksistensi Poltekpar Makassar. Akan tetapi, suatu motivasi untuk lebih memaksimalkan peran serta Poltekpar Makassar untuk membantu daerah mengelola dayatarik wisatanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan pendekatan dengan optimalisasi melibatkan peran dan posisi tiga institusi tersebut (lihat bagan 2).



Bagan 2. Sinergi Dinas Pariwisata Daerah dan Pendidikan Tinggi Kepariwisataan

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Kemitraan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep tetap dapat dilanjutkan dengan memerhatikan prinsip keberlanjutan dan evaluasi kemitraan yang ada. Sebaliknya, Poltekpar dapat menindaklanjuti kegiatan - kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dan dapat memfasilitasi dinas daerah untuk mengembangkan

pariwisata. Poltekpar Makassar dituntut untuk kreatif dan aktif untuk menjalin kemitraan dengan daerah di Sulawesi Selatan sehingga keberadaannya betul-betul memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan pariwisata Sulawesi Selatan secara khusus dan Indonesia secara umum.

### Kesimpulan

Dalam suatu wilayah atau destinasi pariwisata, keterlibatan beberapa kelompok masyarakat atau *stakeholder* adalah salah satu kunci keberhasilan pengembangan pariwisata daerah. Kemitraan yang dibangun antara kalangan akademisi melalui lembaga pendidikan pariwisata dan hospitaliti dengan dinas pariwisata kabupaten dan kota adalah prasyarat untuk melibatkan *stakeholder* tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep telah menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan pariwisata meskipun secara hirarki, eksistensi Politeknik Pariwisata seharusnya dimanfaatkan secara optimal. Kurikulum yang sama antara empat pendidikan tinggi pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia serta kualitas sumber daya manusia yang ada di Poltekpar Makassar sesungguhnya dapat menjadi jembatan bagi para staf untuk memahami pariwisata dan pengelolaan daya tarik wisata yang ada.

Untuk menjalin kemitraan kedua institusi pemerintah ini, dibutuhkan kesamaan prinsip yang saling memahami dan membutuhkan sehingga pariwisata yang berkelanjutan dapat terwujud. Kesiadaan kedua *stakeholder* ini untuk memasukkan program kerja kerjasama dalam rencana strategis pengembangan pariwisata menjadikan kemitraan untuk

sinergitas dapat betul-betul terwujud. Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep mempromosikan dan mengembangkan aset pariwisata daerah dapat menjadikan institusi pendidikan tinggi pariwisata sebagai mitra pelaksana. Sebaliknya, program kerja pengabdian masyarakat suatu perguruan tinggi seyogyanya memasukkan agenda pendidikan dan pelatihan pariwisata bagi staf dinas pariwisata yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Tentunya, identifikasi awal atau analisis kebutuhan informasi yang dibutuhkan bagi staf adalah strategi agar program kerja dapat bermanfaat bagi staf dan pengelolaan daya tarik wisata di daerah secara khusus.

Kemitraan yang dibangun seharusnya tidak terbatas pada institusi pendidikan tinggi kepariwisataan dan hospitaliti di lingkungan Kementerian Pariwisata. Dinas Pariwisata kabupaten dan kota dapat menjalin kemitraan dengan berbagai *stakeholder* yang ada baik lokal, nasional maupun internasional. Tujuan utama kemitraan adalah memberikan kemudahan di daerah dalam menemukan dan mengimplementasikan pendekatan dan strategi dalam membangun daerah melalui pariwisata. Karena itu, daerah diharapkan mampu berfikir kreatif dan inovatif dalam menjalin kerjasama (membangun mitra), memasarkan produk pariwisata, mengelola daya tarik wisata dan mencari alternatif membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pariwisata.

#### Daftar Pustaka

- Aas, C., Ladkin, A., dan Fletcher, J. 2005. Stakeholder collaboration and heritage management. Dalam Timothy, Dallen. J. Editor. *Managing heritage and cultural tourism resources: Critical essays*, Vol. 1. Farnham: Ashgate, Hal. 1-22.
- Altinay, M. dan Hussain, K. 2005. Sustainable tourism development: A case study of North Cyprus. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. Vol. 17 No. 3 2005 Hal. 272-280.
- Brodjonegoro, B., dan Asanuma, S. 2000. Regional autonomy and fiscal decentralization in democratic Indonesia. *Hitotsubashi Journal of Economics*, Vol. 41, Hal. 111-122.
- Byrd, E. T. 2007. Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: Applying stakeholder theory to sustainable tourism development. *Tourism Review* No. 62.
- Chang, T-Y., dan Hsu, J-M. 2010. Development framework for tourism and hospitality in higher vocational education in Taiwan. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, Vol. 9 No. 1 2010 Hal. 101-109.
- Duncan, Christopher. R. 2007. Mixed outcomes: The impact of regional autonomy and decentralization on indigenous ethnic minorities in Indonesia. *Development and Change*, Vol. 38, No. 4, Hal. 711-733.
- Dwyer, L. dan Edwards, D. 2010. Sustainable tourism planning. Dalam Liburd, J.J., dan Edwards, D. Editor. *Understanding the sustainable development of tourism*. Oxford, Goodfellow Publishers: 19-44.
- Farrel, B. dan Twinning-Ward, L. 2005. Seven steps towards sustainability: Tourism in the

- context of new knowledge. *Journal of Sustainable Tourism*, Vol.13 No.2 2005 Hal.109-122.
- Flick, U. 2007. *Designing qualitative research*. London: SAGE.
- Flick, U., dkk. 2004. *What is qualitative research? An introduction to the field*. Dalam Flick, U., Kardorff, E.v., dan Steinke, I. Editor. A companion to qualitative research, London, SAGE. Hal. 3-12.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston, Pitman.
- Huang, R. 2014. Industry engagement with tourism and hospitality education: An examination of students' perspective. Dalam Dredge, D., Airey, D., dan Gross, M. J. Editor. *The routledge handbook of tourism and hospitality education*, London, Routledge, Hal.408-421.
- Inui, Y., Wheeler, D., dan Lankford, S. 2006. Rethinking tourism education: What should schools teach. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, Vol. 5 No. 2 2006 Hal. 25-36.
- Jeffries, D. 2001. *Governments and tourism*. Oxford, Butterworth-Heinemann.
- Legard, R., dkk. 2003. In-depth interviews. Dalam Ritchie, J., dan Lewis, J. Editor. *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*, London, SAGE. Hal.138-169.
- Liamputtong, P. 2009. Qualitative data analysis: Conceptual and practical considerations. *Health Promotion Journal of Australia*, Vol 20 No. 2 2001 Hal. 133.
- Ritchie, J., Spencer, L., dan O'Connor, W. 2003. Carrying out qualitative analysis. Dalam Ritchie, J., dan Lewis, J., Editor. *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*. London: SAGE. Hal.219-262.
- Selin, Steve. 2000. Developing a typology of sustainable tourism partnerships. Dalam Bramwell, Bill., dan Lane, Bernard. Editor. *Tourism collaboration and partnerships: Politics, practice and sustainability*. Clevedon: Channel View Publications. Hal.129-142.
- Tribe, J. 2005. Overview of Research. Dalam Airey, D., dan Tribe, J. Editor. *An international handbook of tourism education*. Oxford, Elsevier, Hal. 26-43.
- Tribe, J. 2014. The curriculum: A philosophic practice? Dalam Dredge, D., Airey, D., dan Gross, M.J. Editor. *The routledge handbook of tourism and hospitality education*. London, Routledge, Hal. 17-29.
- Whitelaw, P. A., dkk. 2009. Training needs of the hospitality industry. Diunduh pada tanggal 10 April 2016 melalui <http://www.sustainabletourisonline.com/awms/Upload/Resource/80093%20%20Training%20Needs%20WEB.pdf>